

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA BANDUNG PERIODE 2008-2012**

**FLYPAPER EFFECT ON GENERAL ALLOCATION FUNDS AND ORIGINAL LOCAL
GOVERNMENT REVENUE TO THE REGIONAL EXPENDITURE IN BANDUNG CITY
2008-2012**

Lino Hedyanto

Universitas Telkom

lino.hedyanto@gmail.com

Sri Rahayu, SE., M.Ak., Ak.

Universitas Telkom

srirahayu@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Pemberian transfer pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah agar dapat meningkatkan penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah terutama dari fiskal daerah. Namun alokasi transfer di negara-negara berkembang kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Keadaan tersebut berakibat pada ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah atau yang dikenal dengan *flypaper effect*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah dan kemudian menganalisis *flypaper effect*. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun 2008-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis dan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah PAD dan DAU secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selama periode penelitian tidak terjadi *flypaper effect* di Kota Bandung karena pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, *Flypaper Effect*

ABSTRACT

Basically, the purpose of transfer is to improve the regional capacity so the excavation funding sources can be improved, especially from the fiscal area. However, the allocation of transfer in developing countries is less attention to the ability of local tax collection. These circumstances result in ineffectiveness in financing local expenditures, known as flypaper effect. The purpose of this study is to analyze the effect of OLGR and GAF to the Regional Expenditure and then analyze the flypaper effect. The sampling technique used is purposive sampling using the Bandung City's Realization Budget Reports in 2008-2012. The data used in this study is secondary data. The analytical method used is the descriptive statistics, hypothesis testing and multiple linear regression models. The results of this study are simultaneously OLGR and GAF have a significant influence on regional expenditure. While the partial OLGR has significant influence on the Regional Expenditure and GAF has no significant effect on Regional Expenditure. In the study period there is no flypaper effect in Bandung City because OLGR has more influence on the Regional Expenditure than GAF.

Keywords: Original Local Government Revenue (OLGR), General Allocation Funds (GAF), Regional Expenditure, Flypaper Effect.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan bentuk realisasi dari desentralisasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan fungsi pemerintah dalam segi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan agar dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan desentralisasi di Indonesia mulai diterapkan sejak tahun 2001. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dampaknya Pemerintah Daerah terdorong untuk mandiri dan memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing. Kemandirian Pemerintah Daerah menjadi sangat penting, terutama mandiri dari aspek keuangannya.

Salah satu bentuk hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah adalah hak dalam mengelola sendiri keuangan daerahnya. Bentuk-bentuk kewenangan daerah dalam bidang keuangan adalah seperti mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah serta retribusi daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan menyusun sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Komponen yang ada dalam APBD adalah anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja-belanja daerah tersebut dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan atau disebut juga dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mentayani et al. (2012) PAD idealnya merupakan sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lainnya cenderung bersifat fluktuatif dan di luar pengendalian kewenangan daerah. Selain PAD, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendapatan lain berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Jadi dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah tidak dibiarkan begitu saja, Pemerintah Pusat tetap memberi bantuan kepada Pemerintah Daerah.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Dari seluruh dana perimbangan tersebut, DAU merupakan sumber dana perimbangan yang paling besar. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

Menurut Rokhaniyah dan Nugroho (2011) pemberian transfer pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai Belanja Daerah yang lebih besar dari pemberian transfer dengan peningkatan upaya Pemerintah Daerah dalam penggalan sumber-

sumber pembiayaan daerah terutama dari fiskal daerah. Sayangnya, menurut Oates (1999) dalam Listiorini (2012) alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Haryanto (2005) menyebutkan bahwa terjadi pola ketergantungan yang sangat tinggi di berbagai daerah di Indonesia terhadap Dana Perimbangan khususnya DAU pada studi 30 provinsi di Indonesia tahun 2002-2004. Keadaan tersebut berakibat pada ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah atau yang dikenal dengan *flypaper effect*.

Fenomena utama dalam penelitian ini adalah *flypaper effect* yang menurut Mentayani et al. (2012) merupakan suatu kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang membelanjakan lebih banyak dan lebih boros dengan menggunakan dana transfer atau DAU dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri atau PAD. Fenomena *flypaper effect* menurut Listiorini (2012) terjadi dalam dua versi. Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang tinggi dari elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Kota Bandung; (2) Membuktikan secara empiris apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Bandung; (3) Membuktikan secara empiris apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Bandung; (4) Membuktikan secara empiris apakah Belanja Daerah Kota Bandung mengalami *flypaper effect*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori dan pengertian di bidang akuntansi. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pada penelitian selanjutnya. Bagi Pemerintah Kota Bandung diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan keadaan DAU, PAD dan Belanja Daerah Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situngkir dan Manurung (2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum

Dalam Tanjung (2012: 107) disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi umum bagi Pemerintah Daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Belanja Daerah

Listiorini (2012) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah jumlah anggaran pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung terkait dan berhubungan dengan program atau kegiatan. Sedangkan dalam Mahsun et al. (2011:83) bahwa belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah bersangkutan. Dalam Mahsun et al. (2011: 83) bahwa belanja diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan program dan kegiatan. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan program dan kegiatan dibagi menjadi kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut Mentayani et al. (2012) Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang diwujudkan dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk memenuhi aktivitas pemerintah dan program pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah idealnya merupakan sumber-sumber pendapatan pokok daerah. Mentayani et al. (2012) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menganggarkan Belanja Daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat Belanja Daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Rokhaniyah dan Nugroho (2011) menjelaskan bahwa PAD peranannya terhadap keseluruhan APBD masih relatif kecil. Potensi masing-masing daerah sangat jauh berbeda, sehingga menimbulkan *fiscal gap*. Untuk mengatasi *fiscal gap* ini maka dilakukan transfer antar pemerintah. Bentuk transfer antar pemerintah yang umum adalah Dana Alokasi Umum. Menurut Mentayani et al. (2012) tujuan pemberian Dana Alokasi Umum adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Hal ini dilakukan sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan, disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Mentayani et al. (2012) menjelaskan bahwa transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan daerah jangka pendek yang dibuat Pemerintah Daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima.

Flypaper Effect

Menurut Rokhaniyah dan Nugroho (2011) pemberian transfer berakibat pada ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Fenomena tersebut dikenal dengan *flypaper effect*. Mentayani et al. (2012) menyatakan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang membelanjakan lebih banyak dan lebih boros dengan menggunakan dana transfer atau Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri atau Pendapatan Asli Daerah. Melo (2002) dan Venter (2007) dalam Rokhaniyah dan Nugroho (2011) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi apabila:

1. Pengaruh/nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh/respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas yang menguji pengaruh antara PAD dan DAU sebagai variabel independen dengan Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Menurut Sanusi (2011:13) analisis deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Sedangkan penelitian verifikatif menurut Arikunto (2010:28) pada dasarnya ingin menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (Y).

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Kota Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung pada tahun 2008-2012.

Untuk dapat mengetahui tentang PAD, DAU dan Belanja Daerah maka dilakukan pengujian Statistik Deskriptif. Menurut Ghozali (2013 :19) Statistika Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Menurut Jogiyanto (2004) dalam Sunjoyo et al. (2013 :24) Mean adalah rata-rata hitung dari suatu data. Biasanya mean digunakan untuk menghitung rata-rata dari data kuantitatif (interval dan rasio). Standar deviasi adalah ukuran dispersi sekitar rata-rata. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari suatu data. Nilai minimum adalah nilai terendah dari suatu data.

Sebelum melakukan analisis regresi linier, data terlebih dahulu diuji layak untuk digunakan atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Menurut Ghozali (2007 :110) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.

Menurut Ghozali (2013 :105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Menurut Ghozali (2013 :139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedestisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali (2013 :110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi.

Model yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis berbentuk Model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Model*) menggunakan program SPSS versi 20,0. Bentuk persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja Daerah
 a = Konstanta
 β_1 - β_2 = Koefisien regresi dari setiap variabel independen
 X_1 = Pendapatan Asli Daerah
 X_2 = Dana Alokasi Umum
 e = Error

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan, maka perlu digunakan analisa melalui uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Bandung secara simultan. Menurut Ghozali (2013 : 97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Bandung secara parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah nilai PAD, DAU dan Belanja Daerah Kota Bandung selama periode 2008 sampai dengan 2012:

Tahun	PAD	DAU	BD
2008	314,627,155,000	965,518,567,000	2,332,197,758,000
2009	360,152,627,000	989,233,620,000	2,677,122,638,000
2010	441,871,142,000	912,571,834,000	2,812,667,107,000
2011	834,505,864,970	1,005,642,188,000	3,391,856,654,280
2012	1,005,583,425,000	1,323,681,042,000	3,960,453,245,000
Total	2,956,740,213,970	5,196,647,251,000	15,174,297,402,280

Dalam lima tahun ini PAD terkecil (Minimum) adalah Rp 314.627.155.000 yang merupakan PAD pada tahun 2008, yaitu periode awal pengamatan penelitian ini. PAD terbesar (Maximum) adalah Rp 1.005.583.425.000 yang merupakan PAD pada tahun 2012, yaitu periode akhir pengamatan penelitian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari awal hingga akhir tahun pengamatan sebesar 219,61%. Peningkatan yang sangat signifikan adalah penambahan PAD jika dibandingkan dengan DAU dan Belanja Daerah. Dan salah satu faktor yang paling dominan dalam penambahan PAD ini adalah penambahan nilai pajak daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Bandung dalam lima tahun terakhir semakin bisa memaksimalkan pendapatannya sendiri dengan meningkatkan pajak daerah.

DAU dalam lima tahun ini menunjukkan DAU terkecil (Minimum) adalah Rp 912.571.834.000 yang merupakan DAU pada tahun 2008, yaitu periode awal pengamatan penelitian ini. DAU terbesar (Maximum) adalah Rp 1.323.681.042.000 yang merupakan DAU pada tahun 2012, yaitu periode akhir pengamatan penelitian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari awal hingga akhir tahun pengamatan sebesar 45,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandung dapat mengendalikan dana transfer dari pemerintah pusat serta memaksimalkannya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya.

Belanja Daerah Kota Bandung juga mengalami peningkatan selama 2008-2012. Belanja Daerah dalam lima tahun ini menunjukkan Belanja Daerah terkecil (Minimum) adalah Rp 2.332.197.758.000 yang merupakan Belanja Daerah pada tahun 2008, yaitu periode awal

pengamatan penelitian ini. Belanja Daerah terbesar (Maximum) adalah Rp 3.960.453.245.000 yang merupakan Belanja Daerah pada tahun 2012, yaitu periode akhir pengamatan penelitian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari awal hingga akhir tahun pengamatan sebesar 69,81%. Walaupun nilai Belanja Daerah Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya, pemerintah Kota Bandung bisa semakin mandiri, terlihat dari semakin besarnya nilai PAD, yang berarti semakin besar juga banyaknya pengeluaran yang dibiayai dengan penghasilan daerahnya sendiri.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan uji statistik *one sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang melihat nilai signifikansi normalitas residual. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,394 dan signifikansinya pada 0,998. Nilai signifikansi diatas $\alpha = 0,05$. Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas menggunakan matrik korelasi dan perhitungan nilai *tolerance* dan VIF. Dapat dilihat hasil besaran antar variabel independen tampak bahwa korelasi antara variabel PAD dan DAU adalah sebesar -0,797 atau sekitar 78%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 90%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

Dapat dilihat hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Hasil perhitungan uji Glejser menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini karena nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil perhitungan uji Durbin-Watson menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,956. Hal menunjukkan bahwa nilai D-W masih berada di antara -2 dan +2. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

Model Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis berbentuk Model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Model*) menggunakan program SPSS versi 20,0. Berikut ini adalah hasil pengujian:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,381E+12	6,721E+11		2,054	,176
	PAD	1,800	,432	,866	4,165	,053
	DAU	,567	,821	,144	,691	,561

a. Dependent Variable: BD

Berdasarkan hasil tersebut maka disusunlah model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.380.805.487.131 + 1,800 X_1 + 0,567 X_2 + e$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta sebesar 1.380.805.487.131 artinya apabila nilai PAD dan DAU bernilai nol, maka Belanja Daerah sebesar 1.380.805.487.131.
2. Variabel PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien 1,800, artinya setiap penambahan 1% PAD maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 1,800%.
3. Variabel DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien 0,567, artinya setiap penambahan 1% DAU maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 0,567%.

Pengujian Hipotesis

Berikut ini adalah hasil dari pengujian hipotesis:

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,603E+24	2	8,015E+23	30,676	,032 ^b
	Residual	5,226E+22	2	2,613E+22		
	Total	1,655E+24	4			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Dari uji ANOVA atau F test pada tabel didapat nilai F_{hitung} sebesar 30,676 sedangkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan ($df_1 = 2$; $df_2 = 2$) adalah sebesar 19,00. Hal ini berarti bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($30,676 > 19,00$). Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Daerah atau dapat dikatakan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,984 ^a	,968	,937	1,616E+11

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Dari tampilan tabel menunjukkan besarnya adjusted R² adalah 0,937, hal ini berarti 93,7% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari ke dua variabel independen PAD dan DAU. Sedangkan sisanya ($100\% - 93,7\% = 6,3\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,381E+12	6,721E+11		2,054	,176
	PAD	1,800	,432	,866	4,165	,053
	DAU	,567	,821	,144	,691	,561

a. Dependent Variable: BD

Dari tampilan tabel menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} PAD adalah sebesar 4,165 sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan ($df = 3$) adalah sebesar 3,182. Hal ini berarti bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,165 > 3,182$). Maka PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan untuk nilai t_{hitung} DAU adalah sebesar 0,691. Hal ini berarti bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,691 < 3,182$). Maka pengaruh DAU tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Bandung secara Simultan

Hasil yang didapat adalah nilai F_{hitung} sebesar 30,676 sedangkan nilai F_{tabel} adalah sebesar 19,00. Maka dapat dikatakan secara bersama-sama PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan uji koefisien determinasi didapatkan nilai R^2 0,937. Artinya 93,7% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi PAD dan DAU. Hasil ini menunjukkan hasil yang sangat besar, yang berarti nilai sisanya yaitu 6,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hal ini berarti PAD dan DAU memiliki pengaruh yang besar terhadap Belanja Daerah, terlihat dari nilai R^2 yang mendekati angka 1. Semakin besar PAD dan DAU maka Belanja Daerah akan semakin besar pula. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mentayani et al (2012) yang menyatakan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Bandung

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} PAD adalah sebesar 4,165 sedangkan nilai t_{tabel} adalah sebesar 3,182. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,165 > 3,182$). Maka PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya semakin besar PAD maka Belanja Daerah akan semakin besar pula. Nilai koefisien PAD terhadap Belanja Daerah sebesar 1,800, artinya jika PAD mengalami penambahan 1% maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 1,800% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri dan merupakan sumber pendapatan pokok daerah. Belanja Daerah digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi semakin besar pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat Belanja Daerah untuk melaksanakan pemerintahan di daerah.

Dengan demikian hipotesis kedua yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Situngkir dan Manurung (2009), Masdjojo dan Sukartono (2009), Rokhanyah dan Nugroho (2011), Mentayani et al. (2012) dan Listiorini (2012) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Bandung

Sedangkan untuk nilai t_{hitung} DAU adalah sebesar 0,691. Hal ini berarti bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,691 < 3,182$). Maka pengaruh DAU tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,567, artinya jika DAU mengalami penambahan 1% maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 0,567% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Ketika DAU mengalami peningkatan, Belanja Daerah juga mengalami peningkatan. Tetapi besarnya peningkatan DAU tidak sebanding dengan peningkatan Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis ketiga yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung dapat ditolak.

DAU pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai Belanja Daerah. Pada umumnya DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah sebagaimana disebutkan dalam penelitian Situngkir dan Manurung (2009), Masdjojo dan Sukartono (2009), Rokhaniyah dan Nugroho (2011), Mentayani et al. (2012) dan Listiorini (2012). Hasil yang tidak signifikan ini bisa jadi dikarenakan oleh jumlah data yang sedikit, yaitu Kota Bandung dalam periode 2008-2012.

Identifikasi *Flypaper Effect*

Flypaper effect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros menggunakan dana transfer atau DAU daripada menggunakan dana sendiri atau PAD. Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah maka harus dibandingkan besarnya pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah dengan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang tampak pada Tabel 4.8 menunjukkan besarnya nilai koefisien dari PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Didapat nilai koefisien PAD terhadap Belanja Daerah sebesar 1,800 sedangkan nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,567. Hal ini berarti pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah.

Karena nilai koefisien pengaruh PAD lebih besar dari nilai koefisien pengaruh DAU berarti tidak terjadi *flypaper effect* pada keuangan daerah pemerintah Kota Bandung pada tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung tidak memiliki pola ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya PAD dari seluruh pendapatan Kota Bandung dan perkembangan DAU yang tidak terlalu besar. Dengan demikian kondisi keuangan Kota Bandung dapat dikatakan cukup baik dan termasuk mandiri dari segi keuangannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan deskriptif, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (a) PAD mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 219,61% yaitu dari Rp 314.627.155.000,- menjadi Rp 1.005.583.425.000,-. (b) DAU mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 45,05% yaitu dari Rp 912.571.834.000,- menjadi Rp 1.323.681.042.000,-. (c) Belanja Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 69,81% yaitu dari Rp 2.332.197.758.000,- menjadi Rp 3.960.453.245.000,-.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, dan DAU secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji F dengan nilai F_{hitung} sebesar 30,676 yang lebih besar dibandingkan F_{tabel} sebesar 19,00. Hasil analisis koefisien determinasi menghasilkan R_{square} sebesar 0,937 yang artinya bahwa variabel independen (PAD dan DAU) memberikan pengaruh sebesar 93,7% terhadap variabel dependen (Belanja Daerah). sedangkan sisanya 6,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti penulis. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji t dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,165 yang lebih besar dibandingkan t_{tabel} sebesar 3,182. DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji t dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,691 yang lebih kecil dibandingkan t_{tabel} sebesar 3,182. Dari analisis *flypaper effect* maka dapat disimpulkan tidak terjadi *flypaper effect* pada Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien PAD terhadap Belanja Daerah sebesar 1,800 yang lebih besar dibandingkan nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,567.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang berbeda baik itu yang berada dipulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua dan menggunakan periode waktu yang lebih panjang.

Untuk pemerintah Kota Bandung sebaiknya meningkatkan PAD dengan menggali potensi daerah diluar pajak daerah, seperti retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progran SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progran IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Joko Tri. (2005). *Analisis Dana Alokasi Umum Kaitannya dengan Penciptaan Kemandirian Daerah di Era Otonomi: Studi Kasus 30 Propinsi di Indonesia*. Simposium Riset Ekonomi II.
- Listiorini. (2012). *Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol.4 No.2.
- Mahsun, Moh. Sulistiyowati, Firma. dan Purwanugraha, Heribertus Andre. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Masdjojo, Gregorius N. dan Sukartono. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008*. Telaah Manajemen, Vol.6 Edisi 1.
- Mentayani, Ida. Hayati, Nurul. dan Rusmanto. (2012). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Spread, Vol.2 No.1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum (diunduh 10 Februari 2014).
- Rokhaniyah, Siti. dan Nugroho, Muh Rudi. (2011). *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008*. Fokus Ekonomi, Vol.10 No.2.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Situngkir, Anggiat dan Manurung, John Sihar. (2009). *Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara*. Kajian Akuntansi, Vol.4 No.2.
- Sunjoyo, et al. (2013). *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*. Bandung : Alfabeta
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2012). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (diunduh 10 Februari 2014).